

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Penelitian

Sekolah Luar Biasa Negeri A Pajajaran merupakan salah satu wadah yang memberikan pelayanan Pendidikan di peruntukkan bagi anak-anak berkebutuhan khusus untuk penyandang disabilitas tuna netra. Sesuai peraturan pemerintah Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang penyandang disabilitas yaitu: (a), bahwa Negara Kesatuan Republik Indonesia menjamin kelangsungan hidup setiap warga negara, termasuk para penyandang disabilitas yang mempunyai kedudukan hukum dan memiliki hak asasi manusia yang sama sebagai Warga Negara Indonesia dan sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari warga negara dan masyarakat Indonesia merupakan amanah dan karunia Tuhan Yang Maha Esa, untuk hidup maju dan berkembang secara adil dan bermartabat; (b) bahwa sebagian besar penyandang disabilitas di Indonesia hidup dalam kondisi rentan, terbelakang, dan/atau miskin disebabkan masih adanya pembatasan, hambatan, kesulitan, dan pengurangan atau penghilangan hak penyandang disabilitas; (c) bahwa untuk mewujudkan kesamaan hak dan kesempatan bagi penyandang disabilitas menuju kehidupan yang sejahtera, mandiri, dan tanpa diskriminasi diperlukan peraturan perundang-undangan yang dapat menjamin pelaksanaannya; (d) bahwa Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1997 tentang Penyandang Cacat, sudah tidak sesuai lagi dengan paradigma kebutuhan penyandang disabilitas sehingga perlu diganti dengan undang-undang yang baru;

Sekolah Luar Biasa Negeri A Pajajaran Kota Bandung merupakan salah satu lembaga pendidikan yang secara khusus melayani peserta didik tunanetra. Sebagai sekolah yang berkomitmen dalam memberikan pendidikan inklusif, SLBN A Pajajaran tidak hanya berfokus pada aspek akademik, tetapi juga pada pengembangan karakter dan kemandirian peserta didik. Sekolah ini berupaya menciptakan lingkungan belajar yang mendukung, ramah, dan adaptif agar siswa dapat berkembang secara optimal sesuai dengan potensi mereka. Selain itu, SLBN A Pajajaran juga memberikan bimbingan dalam pengembangan potensi akademik dan non-akademik bagi peserta didik. Siswa tidak hanya diberikan pendidikan formal sesuai kurikulum yang berlaku, tetapi juga didorong untuk mengembangkan bakat dan minat mereka melalui berbagai kegiatan ekstrakurikuler seperti seni musik, olahraga, dan keterampilan kerajinan tangan. Dengan pendekatan yang holistik, sekolah berupaya untuk membekali peserta didik dengan keterampilan yang dapat meningkatkan kemandirian mereka dan dapat diterima masyarakat.

Dengan sistem tata kelola yang baik, sekolah dapat memastikan bahwa setiap peserta didik mendapatkan layanan pendidikan yang optimal sesuai dengan hak mereka sebagai penyandang disabilitas. Sesuai dengan peraturan pemerintah Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2019 tentang pedoman organisasi tata kerja satuan pendidikan dasar dan menengah yaitu : (a). bahwa satuan pendidikan dasar dan menengah sebagai unit organisasi yang memberikan pelayanan pendidikan dimasyarakat membutuhkan susunan organisasi dan tata kerja yang efektif dan efisien; (b). bahwa untuk kelancaran dan ketertiban dalam pengelolaan dan penyelenggaraan pendidikan pada satuan penyelenggaraan pendidikan pada

satuan pendidikan jenjang pendidikan dasar dan menengah, perlu pedoman organisasi dan tata kerja satuan pendidikan; (c). bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah;

Tata kelola sekolah mencerminkan sejauh mana sekolah mampu mengelola sumber daya secara transparan dan bertanggung jawab, baik dalam pengelolaan anggaran, pengadaan sarana dan prasarana, maupun dalam meningkatkan kompetensi tenaga pendidikan. Akuntabilitas dalam layanan pendidikan di SLB Negeri A Pajajaran Kota Bandung merupakan bentuk pertanggungjawaban sekolah dalam memenuhi hak pendidikan bagi peserta didik tunanetra. Sebagai lembaga pendidikan khusus, lembaga pendidikan khusus wajib memberikan pelayanan yang memenuhi standar pendidikan negara dan berorientasi pada kebutuhan aktual peserta didik penyandang disabilitas. Tanggung jawab sekolah tercermin dari keterbukaan dan tanggung jawabnya untuk memberikan pelayanan terbaik kepada siswanya. Hal ini mencakup tanggung jawab atas penyediaan fasilitas pendidikan, metode pembelajaran yang tepat, dan keterlibatan sekolah dalam memastikan siswa menikmati hak-haknya secara penuh. SLB Negeri A Pajajaran harus memastikan setiap siswa mempunyai akses terhadap kesempatan pendidikan yang sesuai, mulai dari akses terhadap alat-alat seperti buku Braille, teknologi bantu, hingga metode pembelajaran yang mendukung kemandiriannya. Dalam praktiknya, akuntabilitas juga berkaitan dengan transparansi dalam penggunaan dana sekolah. SLB Negeri A Pajajaran bertanggung jawab untuk memastikan bahwa setiap anggaran yang

dialokasikan digunakan sesuai dengan kebutuhan peserta didik, terutama dalam pengadaan fasilitas dan peningkatan layanan pendidikan. Transparansi ini menjadi bukti bahwa sekolah menjalankan kewajibannya dengan penuh tanggung jawab dalam mengelola pendidikan bagi penyandang disabilitas.

Sekolah Luar Biasa Nasional A Pajajaran Kota Bandung mempunyai peranan penting dalam pendidikan penyandang disabilitas, khususnya tunanetra. Sekolah ini didirikan pada tanggal 24 Juli 1901 dan awalnya bernama *Bandoengsche Blinden Instituut* merupakan salah satu lembaga pendidikan tunanetra tertua di Asia Tenggara dan lembaga pendidikan tunanetra terbesar di Indonesia. SLBN A Pajajaran memberikan layanan pendidikan mulai dari sekolah dasar hingga sekolah menengah atas (SMA) kepada siswa tunanetra. Selain memberikan pendidikan formal, sekolah juga berfungsi sebagai pusat rehabilitasi dan pelatihan keterampilan, membantu siswa mengembangkan kemandirian dan keterampilan hidup yang diperlukan. Dalam penyelenggaraan layanan pendidikan bagi penyandang disabilitas, diperlukan tata kelola organisasi yang baik agar seluruh aspek pembelajaran dapat berjalan efektif dan optimal. Tata kelola ini mencakup manajemen tenaga pendidik, penyediaan kurikulum yang sesuai, pemenuhan sarana dan prasarana yang mendukung, serta sistem pendanaan yang berkelanjutan.

Dalam memastikan layanan pendidikan yang diberikan, akuntabilitas tata kelola di SLBN A Pajajaran menjadi faktor utama yang menentukan keberhasilan penyelenggaraan program pendidikan inklusif. Tata kelola yang baik mencakup pengelolaan tenaga pendidik yang memiliki kompetensi dalam pendidikan khusus,

pengelolaan sarana dan prasarana yang mendukung kebutuhan penyandang disabilitas, serta koordinasi dengan berbagai pemangku kepentingan, termasuk pemerintah, komunitas sosial, dan dunia usaha. Selain itu, pengelolaan anggaran yang transparan dan akuntabel menjadi aspek penting dalam menjamin keberlanjutan serta peningkatan mutu layanan di sekolah ini. Dukungan berbagai pemangku kepentingan baik pemerintah, organisasi sosial, dan dunia usaha sangat diperlukan untuk mendukung keberlanjutan proyek pendidikan SLBN A Pajajaran.

Dalam praktiknya, masih terdapat tantangan dalam menerapkan akuntabilitas tata kelola sekolah sesuai dengan prinsip akuntabilitas publik. Pertama penulis melihat SLBN A Pajajaran telah mengalami renovasi untuk meningkatkan kualitas infrastruktur, kondisi sarana dan prasarana di dalam kelas, tetapi peneliti melihat masih kondisi. Meja dan bangku yang digunakan dalam proses pembelajaran terlihat usang dan kurang nyaman bagi siswa tunanetra. Hal ini dapat berdampak pada kenyamanan serta pertanggungjawaban dalam pembelajaran. Serta Salah satu permasalahan yang dihadapi adalah gangguan dari penghuni Orang Dengan Gangguan Jiwa (ODGJ) dan tunawisma yang tinggal di sekitar area sekolah. Kehadiran mereka sering mengganggu proses belajar-mengajar, menciptakan ketidaknyamanan bagi siswa dan tenaga pendidik. Kondisi ini diperburuk oleh kurangnya pengawasan dan penanganan dari pihak terkait, sehingga sekolah kesulitan untuk memastikan keamanan dan kenyamanan peserta didik. Oleh karena itu, diperlukan upaya lebih lanjut dalam penyediaan dan pemeliharaan fasilitas yang lebih layak guna mendukung lingkungan belajar yang optimal bagi peserta didik. Dan SLBN A Pajajaran menghadapi permasalahan

terkait ketidak jelasan status kepemilikan lahan yang menghambat upaya renovasi dan pengembangan fasilitas sekolah. Sengketa antara Pemerintah Provinsi Jawa Barat dan Kementerian Sosial menyebabkan tertundanya perbaikan infrastruktur, sehingga berdampak pada kenyamanan dan kualitas pembelajaran bagi siswa tunanetra. Diperlukan solusi konkret dari pemerintah dan pemangku kepentingan untuk memastikan hak pendidikan bagi siswa tetap terjamin. Dan kurangnya sumber daya yang memadai, keterbatasan tenaga pendidik yang terlatih secara khusus, serta fasilitas yang belum sepenuhnya ramah bagi penyandang disabilitas. Dengan memperkuat koordinasi, meningkatkan kompetensi tenaga pendidik, serta menyediakan sarana dan prasarana yang mendukung, sekolah dapat menciptakan lingkungan belajar yang lebih inklusif, efektif, dan nyaman bagi seluruh warga sekolah. Keterbatasan ini dapat mengakibatkan kurangnya masukan konstruktif dari sekolah untuk meningkatkan kualitas layanan dan memastikan hak pendidikan penyandang disabilitas terwujud dengan baik.

SLBN A Pajajaran diharapkan dapat menjadi model pendidikan inklusif yang berkelanjutan dan mendukung kemandirian peserta didik. Untuk itu perlu ditelaah lebih lanjut bagaimana sekolah mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan program pendidikan yang dijalankan, serta sejauh mana sekolah telah memenuhi standar pendidikan inklusif yang ditetapkan oleh pemerintah. Dari dasar inilah, maka penulis berminat untuk melakukan penelitian Dengan judul “Akuntabilitas Tata Kelola Di Sekolah Luar Biasa Negeri A (Tuna Netra Di Kota Bandung”

1.2 Fokus Penelitian

Penelitian ini berfokus pada bagaimana akuntabilitas tata kelola di Sekolah Luar Biasa Negeri A Pajajaran Kota Bandung. Kajian ini akan menelaah bagaimana SLBN A Pajajaran menerapkan prinsip akuntabilitas publik dalam pengelolaan sekolah. Untuk meningkatkan kualitas layanan pendidikan bagi penyandang disabilitas.

1.3 Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian yang dipaparkan, peneliti merumuskan masalah menjadi pernyataan penelitian sebagai berikut:

1. Bagaimana Akuntabilitas Tata kelola Di Sekolah Luar Biasa Negeri A (Tuna Netra) Pajajaran di Kota Bandung
2. Faktor-faktor apa saja yang mendukung diterapkannya akuntabilitas tata kelola SLBN A secara akuntabel.

1.4 Tujuan Penelitian

Tujuan Penelitian ini dilaksanakan untuk:

1. Mendapatkan Gambaran dan Akuntabilitas tata kelola di SLBN A Pajajaran.
2. Mengetahui faktor-faktor yang mendukung dilaksanakan Akuntabilitas tata kelola secara efektif.

1.5 Kegunaan Penelitian

Penelitian mengenai Akuntabilitas Tata Kelola organisasi sekolah luar biasa negeri A (Tuna Netra) Pajajaran Kota Bandung. ini diharapkan memberikan gambaran yang jelas dan bermanfaat bila dilihat dari teoritis maupun praktis, yakni:

1) Kegunaan Teoritis

Diharapkan dengan adanya penelitian ini diharapkan dapat menambah ilmu pengetahuan dalam wawasan keilmuan Administrasi Publik dan menjadi dokumen akademik yang berguna untuk dijadikan acuan bagi aktivitas akademik. Khususnya mengenai Akuntabilitas Tata Kelola sekolah luar biasa negeri A (Tuna Netra) pajajaran kota bandung dalam mempertanggungjawabkan pelayanan pendidikan.

2) Kegunaan Praktis

Hasil penelitian diharapkan dapat membawa manfaat bagi semua pihak khususnya SLB Negeri A Pajajaran dan instansi terkait untuk meningkatkan Akuntabilitas Tata kelola terhadap pelayanan peserta didik di Kota Bandung. Melalui kajian ini diharapkan sekolah mampu menerapkan sistem tata kelola yang lebih efektif dan efisien untuk mendukung proses pendidikan inklusif secara akuntabel.